KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Prolegnas Cenderung Ego Sektoral : Putuskan Mata Rantai Kemerosotan Proses Legislasi
Tanggal : Jumat, 15 Agustus 2014
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A5

Prolegnas Cenderung Ego Sektoral

Putuskan Mata Rantai Kemerosotan Proses Legislasi

DOK SP

Agus Dwiyanto

[JAKARTA] Kinerja DPR dalam bidang legislasi masih jauh dari harapan. Di akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014, cukup banyak rancangan undang-undang yang belum diselesaikan.

Perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disusun secara tidak sistematis dan cenderung ego sektoral. Parahnya, sistem kerja DPR dalam fungsi legislasi tidak memadai. Hal inilah yang ditengarai menjadi faktor siginifikan penyebab buruknya kinerja legislasi parlemen.

"DPR itu salah satu tugas utamanya ialah membuat undang-undang (UU). Ternyata produksi UU sedikit sekali, banyak RUU yang belum tuntas," kata Ketua Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA) Fadel Muhammad, di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (14/8).

Meski demikian, menurut Fadel, setidaknya hingga akhir 2013, produk legislasi DPR periode 2009-2014, memiliki kecenderungan yang lebih baik dibandingkan DPR periode sebelumnya. Namun, lanjut dia, bukan berarti kinerja legislasi parlemen sudah membaik.

Dia mencontohkan, kinerja legislasi pada Prolegnas 2009-2014 bidang ekonomi yang dianggap mengecewakan. Sebab, hanya 10 RUU disahkan dari 39 RUU yang direncanakan. Sisanya, delapan RUU masih dalam proses pembahasan, sedangkan 21 RUU tidak pernah disentuh sama sekali.

"DPR masa bakti 2014-2019 mempunyai pekerjaan rumah besar untuk memutus rantai involusi proses legislasi yang ada selama ini, melalui paradigma baru legislasi, berdasarkan sebuah kajian akademis dan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Fadel, yang juga anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Gorontalo.

> **DPR masa bakti 2014-2019 mempunyai pekerjaan rumah besar untuk memutus rantai involusi proses legislasi yang ada selama ini, melalui paradigma baru legislasi.**

Kepala LAN Agus Dwiyanto menyatakan bahwa buruknya kinerja legislasi parlemen akan berdampak luas. "Secara kualitatif, sistem legislasi yang buruk akan menghasilkan kualitas regulasi yang buruk pula. Lebih jauh dari itu, hal ini dapat mempengaruhi kinerja perekonomian negara, karena regulasi yang dihasilkan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya," katanya.

Akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Amir Efendi Siregar berharap agar DPR periode 2014-2019 dapat melahirkan UU yang menciptakan kesejahteraan rakyat.

"Harus ada prioritas. Mari kita coba susun regulasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Seminar Nasional

ASPA dan LAN bakal menggelar seminar nasional. Seminar bertujuan mengevaluasi kinerja legislasi DPR. Selain itu juga akan dirumuskan solusi konstruktif bagi perbaikan sistem legislasi parlemen.

"Diharapkan melalui Seminar Nasional ini dapat dirumuskan paradigma baru legislasi nasional, dari perspektif praktis maupun akademis, yang akan disampaikan sebagai saran kebijakan kepada DPR periode 2014-2019," kata Agus.

Seminar rencananya dilaksanakan pada 3 September 2014, dimulai pukul 09:00 WIB bertempat di Aula LAN. "Pesertanya meliputi beberapa Anggota DPR terpilih periode 2014-2019, Biro Hukum Kementerian dan Lembaga Negara, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kalangan perguruan tinggi, pengurus partai politik, serta pihak-pihak lain yang tekait," kata Fadel. [C-6]